



DEWAN BARU, DAPAT 7 RAPERDA 'WARISAN'

Diprediksi Sulit Dituntaskan

YOGYA (KR) - Anggota DPRD Kota Yogya yang baru atau masa jabatan 2019-2024, dipastikan akan mendapatkan tujuh raperda warisan dari periode sebelumnya. Dengan sisa waktu efektif empat bulan hingga akhir tahun, warisan tersebut diprediksi akan sulit dituntaskan.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogya Bambang Anjar Jalumurti, mengungkapkan total ada sebelas raperda yang masih dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2019. "Dari sebelas target itu baru empat raper-

2019 mendatang, anggota dewan masa jabatan 2019-2024 masih disibukkan dengan pembentukan alat kelengkapan dewan. "Kami akan berkoordinasi dengan DIY jika nantinya ada raperda yang masih belum bisa diselesaikan. Karena setiap propemperda hanya difasilitasi dalam satu tahun anggaran," jelasnya.

Selain itu, dari tujuh raperda warisan tersebut ada satu raperda yang membutuhkan proses pembahasan cukup intensif. Yakni terkait revisi RTRW lantaran perlu melakukan berbagai pendalaman. Di sam-

da yang bisa diselesaikan oleh anggota dewan saat ini. Jadi masih ada tujuh raperda yang akan dilanjutkan pembahasannya oleh anggota dewan baru," jelasnya, Jumat (9/8).

Empat raperda yang sudah diselesaikan oleh anggota dewan periode 2014-2019

ping itu juga ada raperda yang sifatnya mendesak, yakni terkait APBD 2020.

Sementara itu, terkait pelantikan anggota dewan masa jabatan 2019-2024, Senin (12/8), Sekretariat DPRD Kota Yogya sudah mengadakan gladi bersih di ruang sidang paripurna. Total ada 450 tamu undangan yang kursinya sudah disiapkan.

Sumpah masa jabatan akan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sedangkan sambutan Gubernur DIY akan dibacakan oleh Walikota Yogya. (Dhi)-m

ialah terkait LPJ 2018, APBD Perubahan 2019, kelembagaan baru Bank Jogja, dan penyertaan modal Bank Jogja. Sedangkan tujuh raperda warisan yang harus dibahas oleh anggota dewan selanjutnya ialah terkait revisi RTRW, perubahan OPD, retribusi IMB, PD Jogjatama Vishesha, APBD 2020, ketahanan keluarga serta tentang utilitas.

Tujuh raperda yang harus diselesaikan dalam tempo empat bulan, imbuhan Bambang, juga bukan perkara mudah. Apalagi usai dilantik pada 12 Agustus

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005